

**PEDOMAN POS INFORMASI
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
AKIBAT BENCANA**



**DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Dasar Hukum	2
E. Pengertian.....	3
II. PENGORGANISASIAN	4
A. Kedudukan dan Alur Informasi.....	4
B. Struktur, Tugas dan Fungsi.....	5
III. TATA HUBUNGAN KERJA DAN MEKANISME KERJA	7
A. Tata Hubungan Kerja	7
B. Mekanisme Kerja	7
IV. SUMBER DAYA	13
A. Ketenagaan	13
B. Sarana dan Prasarana	14
C. Anggaran	15
V. PENUTUP	16
LAMPIRAN - LAMPIRAN	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam bencana non alam maupun bencana sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana adalah kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan, epidemic, wabah penyakit dan penyebab lain seperti keragaman sosial ekonomi budaya dan etnik yang akan memicu terjadinya kerawanan sosial.

Kejadian bencana di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik frekuensi maupun intensitasnya. Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, sepanjang tahun 2007 tercatat 205 kejadian bencana di beberapa wilayah Indonesia dan ini meningkat dari tahun 2006 yang tercatat sebanyak 162 kali. Banjir merupakan jenis bencana yang paling tinggi frekuensinya pada tahun 2007 yaitu 99 kali (48%) dengan jumlah korban meninggal sebanyak 140 orang, rawat inap 2.303 orang, rawat jalan 299.414 jiwa dan pengungsi sebanyak 610.065 orang. Angin puting beliung, banjir dan tanah longsor, dan tanah longsor merupakan jenis bencana dengan frekuensi tinggi setelah banjir, masing-masing sebanyak 22 kali (10,73%), 20 kali (9,76%) dan 18 kali (8,78%). Data dan informasi tersebut merupakan dasar dalam perencanaan program pengurangan risiko bencana dan merupakan tantangan bagi sector kesehatan agar terus melakukan peningkatan kualitas penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang mudah dijangkau termasuk ketersediaan data terkini yang cepat, tepat dan akurat. Hal ini dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait untuk menetapkan keputusan dan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana baik dalam situasi sedang tidak terjadi bencana (pra bencana), tanggap darurat (saat bencana) maupun pasca bencana (pasca bencana). Untuk kegiatan pra bencana, sistem informasi yang terangkai dengan sistem peringatan dini *multi hazard* berbasis masyarakat, penting peranannya dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana.

Mengingat pentingnya informasi dan komunikasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, maka upaya pemantapan dan pengembangannya merupakan suatu langkah yang perlu diwujudkan. Salah satu pengaplikasiannya adalah dengan membentuk Pos informasi PK-AB yang akan berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan informasi dan komunikasi penanggulangan krisis akibat bencana.

Sebagai acuan bagi pembentukan dan pengelolaan Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk, maka perlu disusun Pedoman Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.

B. Tujuan

1. Umum
Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana secara cepat tepat dan akurat.
2. Khusus
 - a. Terbentuknya Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b. Terbentuknya pengorganisasian dalam Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
 - c. Tersedianya tata hubungan kerja dan mekanisme kerja di Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.
 - d. Tersedianya sumber daya untuk pengelolaan Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana

C. Sasaran

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1227 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1228 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 783 Tahun 2006 Tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 064 Tahun 2006 Tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain.

E. Pengertian

1. Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana adalah unit fungsional yang dibentuk untuk mengelola informasi dan komunikasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
2. Sistem informasi adalah kumpulan modul atau komponen yang dapat mengumpulkan, mengelola, memproses, menyimpan, menganalisa dan mendistribusikan informasi untuk tujuan tertentu.
3. Sistem informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi terkait dengan upaya penanggulangan krisis akibat bencana.
4. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.
5. Komunikasi radio adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio, mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan dari gelombang-gelombang radio untuk tujuan komunikasi tertentu.
6. Radio komunikasi adalah peralatan komunikasi yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem gelombang radio.
7. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.

BAB II PENGORGANISASIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 Tanggal 31 Januari 2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, Dinas kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi. Upaya penyediaan data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 064/Menkes/SK/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 Tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana.

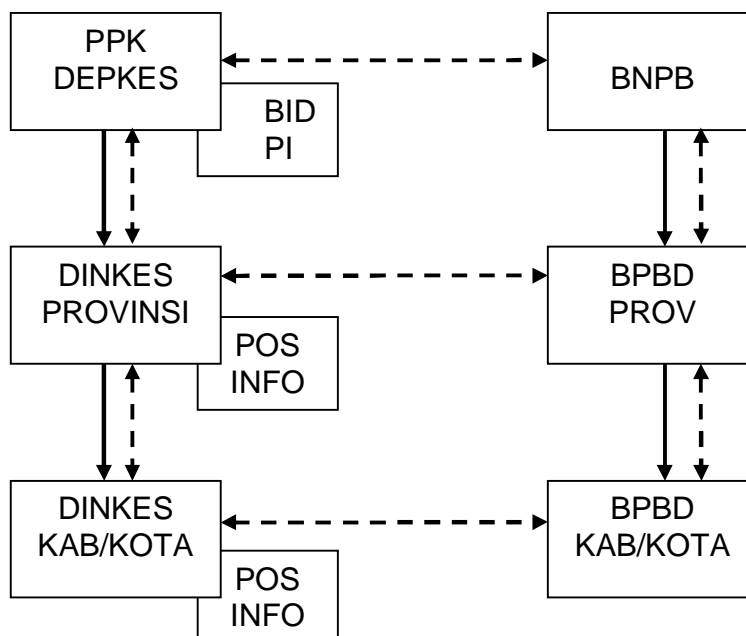
A. Kedudukan dan Alur Informasi

Kedudukan

Pos Informasi adalah unit pelaksana fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang menangani Penanggulan Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pos Informasi di provinsi yang menjadi PPK Regional dan Sub Regional sekaligus menjadi Pos Informasi Regional dan Pos Informasi Sub Regional.

Bagan 1
Kedudukan dan Alur Pos Informasi

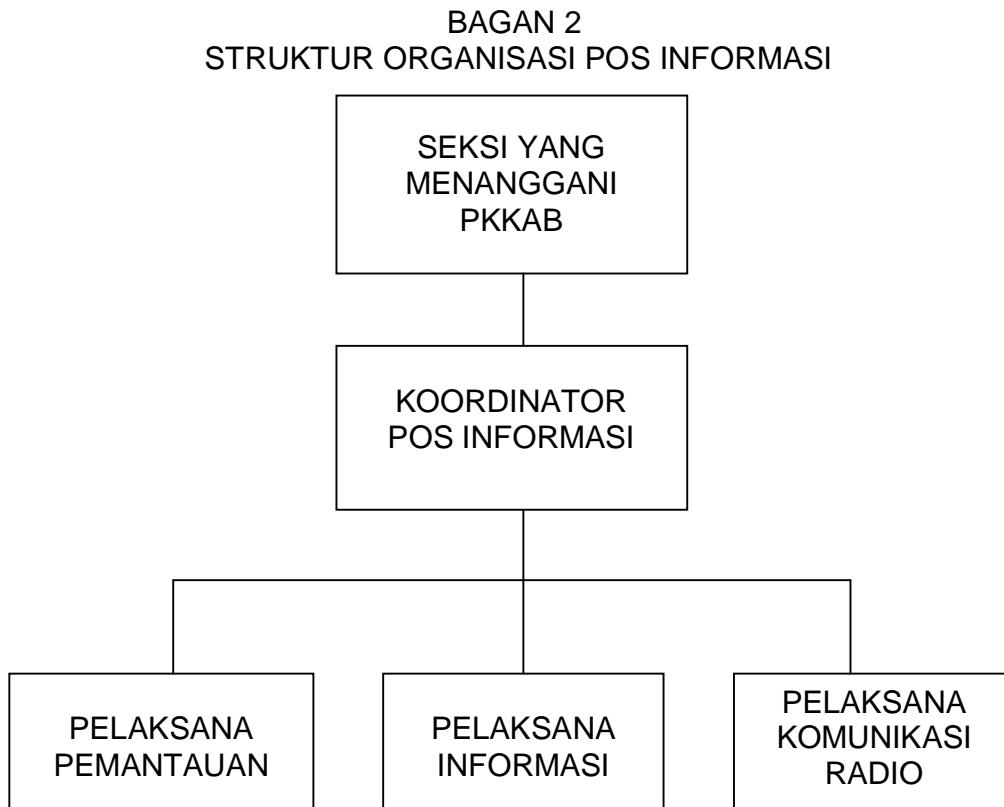


Ket : ----- = alur informasi
 ————— = alur komando

B. Struktur, Tugas dan Fungsi

1. Struktur Pos Informasi

Struktur Organisasi Pos Informasi



2. Tugas

Pos informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan distribusi informasi.

Bagi Provinsi yang menjadi PPK Regional dan PPK Sub Regional wajib mengelola data dan informasi dari Anggota Regional dan Anggota Sub Regional.

Koordinator Pos Informasi mempunyai tugas :

- a. Penanggung jawab dalam pengoperasionalan Pos Informasi.
- b. Penanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan masalah kesehatan lain selama 24 jam.

Pelaksana Pemantauan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain melalui media cetak,elektronik (televisi,radio,website dan internet) dan komunikasi radio.
- b. Melaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- c. Melaksanakan penyusunan data pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana untuk disampaikan kepada pimpinan.
- d. Melaksanakan pendistribusian data penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Pelaksana Informasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisa data dan informasi yang berhubungan dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- b. Melaksanakan penyajian informasi yang berhubungan dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana melalui website,news letter,GIS dan sebagainya.

Pelaksana Komunikasi Radio mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pencatatan komunikasi radio dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- b. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan peralatan radio komunikasi dalam Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

3. Fungsi

Pos informasi adalah sebagai pengelola data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

BAB III

TATA HUBUNGAN KERJA DAN MEKANISME KERJA

A. Tata Hubungan Kerja

1. Di Pos Informasi

Tata hubungan kerja di Pos Informasi yaitu :

- a. Hubungan kerja antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Koordinator adalah koordinasi fungsional.
- b. Hubungan kerja antara Koordinator dengan Pelaksana merupakan hubungan teknis fungsional di bidang pengelolaan data penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- c. Hubungan antar Pelaksana merupakan hubungan komunikatif, konsultatif dan konfirmatif dibidang teknis pengelolaan data penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

2. Pos Informasi dengan Lintas Program

Tata hubungan kerja antara Pos Informasi dengan Penanggung Jawab Program yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana merupakan hubungan koordinasi fungsional.

3. Pos Informasi dengan Lintas Sektor

Tata hubungan kerja Pos Informasi yang berada di bawah kendali Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat pra bencana merupakan hubungan koordinatif teknis fungsional dan pada saat bencana merupakan hubungan komando.

B. Mekanisme Kerja

Informasi yang dikumpulkan oleh Pos Informasi adalah informasi yang terkait dengan bencana baik pada tahap pra bencana, tahap saat bencana maupun tahap pasca bencana. Informasi tersebut dapat berasal dari lingkungan jajaran kesehatan, lintas sektor, media dan masyarakat.

1. Pra Bencana

Informasi yang dikumpulkan pada saat pra bencana adalah :

- a. Informasi sumber daya baik tenaga, dana, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana (Form Kesiapsiagaan pada Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana).

Informasi tersebut bersumber dari Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.

- b. Informasi dari lintas sektor terkait, misalnya meteorologi dan geofisika dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang disebabkan oleh fenomena cuaca dan iklim (prakiraan cuaca harian/mingguan, prakiraan hujan bulanan dan prakiraan musim hujan/kemarau) serta informasi gempa bumi dan tsunami yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- c. Informasi nomor telepon, faksimili (kantor dan rumah) serta nomor telepon genggam/*mobile* dari petugas yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana baik dari lintas program maupun lintas sektor untuk membangun jaringan informasi dan komunikasi (*contact person*). Informasi tersebut bersumber dari Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan lintas sektor yang terkait dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan pengolahan, dengan melakukan :

- a. Penyusunan tabel bencana.
- b. Penyusunan peta daerah rawan krisis kesehatan akibat bencana.
- c. Penyusunan buku profil penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang berisi informasi tentang sumber daya baik tenaga, dana, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain.
- d. Penyusunan buku informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang pernah terjadi.
- e. Pembuatan website.
- f. Pembuatan peta jalur evakuasi sarana kesehatan pada daerah rawan bencana (ring 1, ring 2 dan ring 3)

Informasi yang telah diolah tersebut kemudian disebarluaskan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk lebih memudahkan penyampaian informasi ke seluruh pengguna yang membutuhkan informasi secara cepat dengan biaya yang relatif murah.

2. Saat Bencana

Informasi yang dikumpulkan pada saat bencana adalah :

- a. Informasi awal penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain (Form B1 dan B4 pada Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana).
- b. Informasi perkembangan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain (Form B2 pada Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana).

Informasi tersebut bersumber dari Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, instansi terkait, masyarakat, media cetak dan media elektronik.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah, dengan melakukan :

- a. Penyusunan laporan awal penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- b. Penyusunan laporan perkembangan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Sesuai dengan kebutuhan akan informasi, pemantauan dan pelaporan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat dilakukan sesering mungkin. Semua data dan informasi yang didapatkan akan menjadi landasan dalam pengambilan langkah dan strategi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Pemantauan ini terus berlangsung hingga penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat ditangani terutama pada masa tanggap darurat.

Informasi yang telah diolah tersebut kemudian disebarluaskan dengan memanfaatkan teknologi informasi/elektronik untuk lebih memudahkan penyampaian informasi ke seluruh pengguna yang membutuhkan informasi secara cepat dengan biaya yang relatif murah dengan membuat *Media Center* di Pos Informasi.

3. Pasca Bencana

Informasi yang dikumpulkan pada saat pasca bencana adalah :

- a. Informasi pemulihan/rehabilitasi dan pembangunan kembali/rekonstruksi sarana/prasarana kesehatan yang mengalami kerusakan.
- b. Informasi upaya pelayanan kesehatan (pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi), kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya yang terkena dampak.
- c. Informasi relawan, kader dan petugas pemerintah yang memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada kelompok yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma dan memberikan konseling pada individu yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma.
- d. Informasi pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang.
- e. Informasi rujukan korban yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi atau penanggulangan lebih spesifik.

Informasi tersebut bersumber dari Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan lintas sektor.

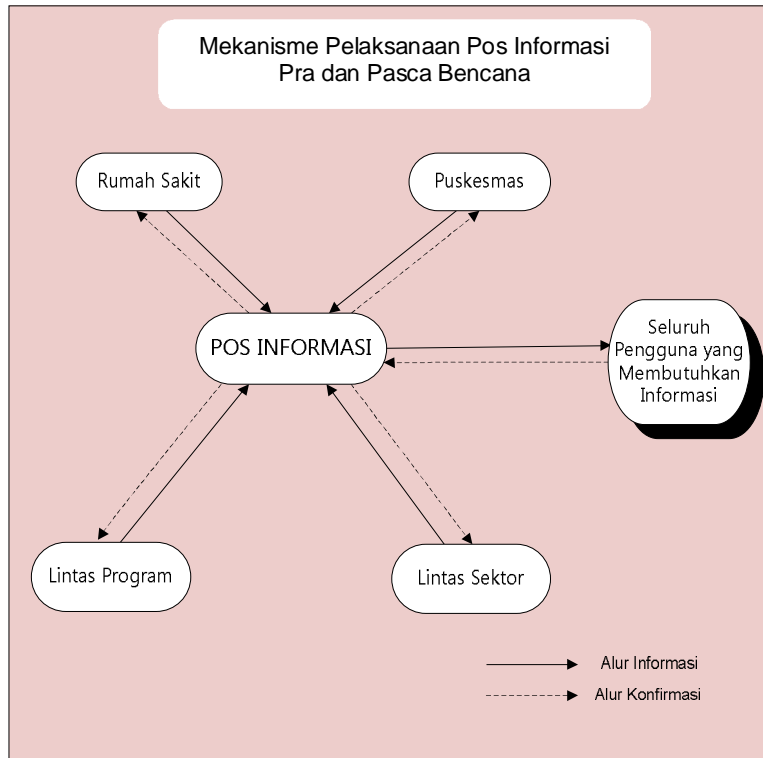
Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah, dengan melakukan :

- a. Penyusunan informasi dengan program terkait dalam rangka upaya pemulihan/rehabilitasi dan pembangunan kembali/rekonstruksi sarana/prasarana kesehatan yang mengalami kerusakan.
- b. Penyusunan informasi dengan program terkait dalam upaya pelayanan kesehatan (pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi), kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya yang terkena dampak.
- c. Penyusunan informasi dengan program terkait tentang upaya relawan, kader dan petugas pemerintah yang memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada kelompok yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma dan memberikan konseling pada individu yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma.
- d. Penyusunan informasi dengan program terkait dalam rangka upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang.
- e. Penyusunan informasi dengan program terkait dalam rangka upaya rujukan korban yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi atau penanggulangan lebih spesifik.

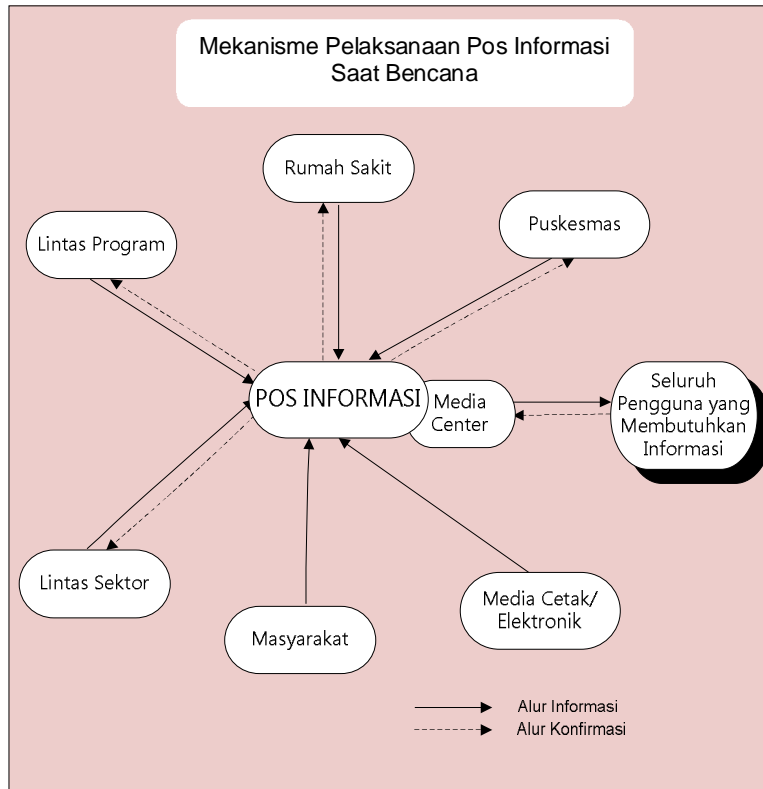
Informasi yang telah diolah tersebut kemudian disebarluaskan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk lebih memudahkan penyampaian informasi ke seluruh pengguna yang membutuhkan informasi secara cepat dengan biaya yang relatif murah.

Bagan mekanisme pelaksanaan pos informasi dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 4
Mekanisme Pelaksanaan Pos Informasi
Pra dan Pasca Bencana



Bagan 4 Mekanisme Pelaksanaan Pos Informasi Saat Bencana



BAB IV SUMBER DAYA

A. Ketenagaan

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan suatu organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang cukup, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal kegiatan suatu organisasi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan kebutuhan dan pengembangannya. Tuntutan untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .

Pengelolaan Pos Informasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mendukung fungsinya sebagai jendela informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang tidak hanya terbatas pada staf operasional semata, namun juga meliputi tingkatan manajerial.

Seperti yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, struktur organisasi Pos Informasi terdiri dari Manajer, Koordinator Pemantauan, Koordinator Informasi, Koordinator Komunikasi Radio dan staf. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang saling terkait dan saling menunjang dalam mengelola Pos Informasi. Untuk itu perlu diuraikan kriteria bagi semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Pos Informasi.

Tenaga yang bekerja di Pos Informasi minimal D3 dan perlu untuk selalu ditingkatkan kapasitasnya baik melalui pendidikan formal atau pelatihan yang terkait dengan data, informasi dan komunikasi

Kriteria Koordinator Pos Informasi:

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan organisasi dengan fokus informasi dan komunikasi.
2. Memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan organisasi.
3. Memiliki kemampuan dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan dalam pekerjaan.

Kriteria Pelaksana Pemantauan:

1. Memiliki kemampuan merencanakan kegiatan pemantauan
2. Memiliki kemampuan dalam mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pekerjaan
3. Memiliki kemampuan mengelola data dan menyusun laporan dengan menggunakan komputer dan internet

Kriteria Pelaksana Informasi:

1. Memiliki kemampuan merencanakan kegiatan informasi
2. Memiliki kemampuan dalam mengarahkan dan membimbing bawahan dalam bekerja.
3. Memiliki kemampuan mengelola data dan menyajikan informasi dengan menggunakan komputer dan internet

Kriteria Pelaksana Komunikasi Radio:

1. Memiliki kemampuan merencanakan kegiatan komunikasi radio.
2. Memiliki kemampuan dalam mengarahkan dan membimbing bawahan dalam bekerja.
3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan serta memelihara radio komunikasi.
4. Mampu mengoperasionalkan radio komunikasi

Kriteria Staf (sesuai kebutuhan):

1. Mampu menggunakan komputer
2. Mampu menggunakan internet
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengolah data

B. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan informasi dan komunikasi pada saat bencana memerlukan kecepatan, ketepatan dan keakuratan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang memadai yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan kebutuhan vital dari sebuah Pos Informasi.

Salah satu sarana penting dalam sebuah Pos Informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah radio komunikasi, karena kejadian bencana seringkali melumpuhkan sarana publik termasuk sarana komunikasi seperti telepon, telepon seluler, faksimili, dan internet. Solusi untuk menghadapi kondisi demikian adalah dengan menggunakan komunikasi radio. Selain peralatannya, juga harus disiapkan frekuensi khusus untuk komunikasi radio sebagai pengamanan, mengingat tidak semua informasi kesehatan dapat diakses secara bebas oleh publik.

Untuk lebih rincinya, sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Ruang dilengkapi meubelair dan pendingin ruangan (AC)
2. Telepon
3. Faksimili
4. Perangkat radio komunikasi (SSB, RIG, HT, Receiver, Repeater, Antena dll)
5. Komputer dengan fasilitas modem
6. LCD dan Screen Projector
7. Jaringan internet kabel atau nirkabel
8. Mesin print

9. Scanner
10. Kamera Digital
11. Televisi dan radio
12. Handycam
13. VCD/ DVD player
14. HP biasa dan satelit
15. Server
16. Geographic Information System (GIS)
17. Global Positioning System

C. Anggaran

Anggaran Pos Informasi dapat berasal dari APBN, APBD dan bantuan yang tidak mengikat. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya:

1. Operasional
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi
4. Penyediaan peralatan yang dibutuhkan
5. Pemeliharaan peralatan
6. Pengembangan sistem informasi (website, GIS, SMS Gateway, dsb)

BAB V PENUTUP

Pembentukan maupun pengelolaan Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana akan terlaksana dengan baik apabila terdapat pedoman yang jelas meliputi pengorganisasian, tata hubungan dan mekanisme kerja dari masing-masing Pos Informasi serta kriteria sumber daya di dalamnya.

Dengan tersusunnya buku Pedoman Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan motivator bagi Dinas Kesehatan untuk membentuk Pos Informasi. Di samping itu, tentu saja supaya dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan yang sudah memiliki Pos Informasi maupun yang akan membentuknya, sehingga dapat berjalan dengan lebih baik.

Perwujudan adanya Pos Informasi yang ideal sesuai dengan isi buku pedoman ini merupakan suatu tantangan tersendiri mengingat begitu banyak kendala di lapangan yang akan dihadapi. Karena itu pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap serta terus menerus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memperbaikinya

Pembentukan Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di seluruh PPK Regional/Sub Regional yang berkualitas, akan lebih melancarkan arus informasi secara cepat, tepat dan akurat mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, sehingga pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dan tentu saja ini erat kaitannya untuk mewujudkan kegiatan pengurangan risiko bencana.

5. Rencana kontinjensi PK-AB yang pernah disusun
 - a.
 - b.
 - c.

6. Pertemuan koordinasi lintas program dalam PK-AB
 - a. Program yang terlibat:
 -
 -
 -
 -
 -
 - b. Frekuensi pertemuan:
 - Rutin, kali dalam setahun
 - Insidental, kali yang dilakukan dalam tahun ini

7. Pertemuan koordinasi lintas sektor dalam PK-AB
 - a. Sektor yang terlibat:
 -
 -
 -
 -
 -
 - b. Frekuensi pertemuan:
 - Rutin, kali dalam setahun
 - Insidental, kali yang dilakukan dalam tahun ini

B. Peraturan/Pedoman/Protap

1. Peraturan-peraturan mengenai PK-AB yang pernah dibuat:
 - a.
 - b.
 - c.

2. Pedoman/Protap/Juklak/Juknis PK-AB yang pernah dibuat:
 - a.
 - b.
 - c.

C. Informasi Wilayah Rawan dan Kejadian Bencana

1. Data wilayah rawan bencana

No	Wilayah (Kabupaten / Kecamatan / Desa)	Jenis Bencana	Keterangan

2. Data kejadian bencana yang terjadi pada tahun lalu dan tahun ini

No	Lokasi/Tempat Kejadian	Tgl Kejadian	Jenis Bencana	Jumlah Korban					Fasilitas Kesehatan Yang Rusak		
				Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	Total	Jenis Fasilitas	Rusak Ringan	Rusak Berat
									Kantor Dinkes		
									RS		
									Pusk		
									Pustu		
									Polindes		
									Pusling/ Ambulans		
									Lainnya.....		
									Kantor Dinkes		
									RS		
									Pusk		
									Pustu		
									Polindes		
									Pusling/ Ambulans		
									Lainnya.....		

No	Lokasi/Tempat Kejadian	Tgl Kejadian	Jenis Bencana	Jumlah Korban					Fasilitas Kesehatan Yang Rusak		
				Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	Total	Jenis Fasilitas	Rusak Ringan	Rusak Berat
									Kantor Dinkes		
									RS		
									Pusk		
									Pustu		
									Polindes		
									Pusing/ Ambulans		
									Lainnya.....		
	Dst										

D. Ketenagaan

1. Klasifikasi tenaga di Dinkes yang dapat dimobilisasi untuk PK-AB

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Keterangan
1.	Dokter		
2.	Ahli Kesehatan Masyarakat		
3.	Epidemiolog		
4.	Ahli Kesling/Sanitarian		
5.	Ahli Gizi		
6	Perawat		
7.	Bidan		
8.	Apoteker/Asisten Apoteker		
9.	Lain-lain.....		
10	dst		
	Jumlah		

2. Klasifikasi tenaga di Puskesmas yang dapat dimobilisasi untuk PK-AB

No	Puskesmas (Kecamatan)	Dokter	Ahli Kesmas	Sanitarian	Ahli Gizi	Perawat	Bidan	Apoteker/ Ass. Apoteker	Lain-lain.....	Dst

3. Klasifikasi tenaga tim reaksi cepat / BSB jika ada

No	Jenis Tenaga			Jumlah
	Medis	Jumlah	Non Medis	
	Total		Total	

4. Jumlah tenaga kesehatan menurut klasifikasinya di RSUD yang dapat dimobilisasi untuk PK-AB

No	Uraian	RSU....	RSU....	RSU....	RSU....	RSU....	Dst
1.	dr. Umum						
2.	dr. Spesialis:						
	a. Bedah						
	b. Interna						
	c. Ob-Gyn						
	d. Anak						
	e. Anestesi						
	f. Jiwa						
	g. Radiologi						
3.	Perawat Mahir Bedah						
4.	Ahli Madya Anestesi						
5.	Ahli Madya Radiologi						

5. Jumlah tenaga yang pernah mengikuti pendidikan/pelatihan khusus PK-AB

No	Pendidikan/Pelatihan	Dinkes	RSU....	RSU....	Pusk.....	Pusk.....	Pusk.....	Pusk.....	Pusk.....	Dst
1.	TOT Penanganan Kedaruratan Kompleks									
2.	ATLS									
3.	ACLS									
4.	BTLS									
5.	PPGD									
6.	Public Health in Complex Emergencies									
7.									
8.									
	Jumlah									

6. Pelatihan yang diselenggarakan untuk PK-AB

No	Uraian Pelatihan	Frekuensi	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

7. Gladi yang diselenggarakan dalam rangka PK-AB

No	Jenis Gladi	Frekuensi	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinkes/RS/Puskesmas yang dapat dimobilisasi untuk penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana saat ini:

No.	Sarana	Dinkes	RSU....	RSU....	Pusk....	Pusk....	Pusk....	Pusk....	Dst
1.	Sarana Transportasi a. Ambulans/Pusling b. Mobil Jenazah c. Kendaraan bak terbuka d. Kendaraan roda 4 lainnya e. Pusling air f. Perahu motor/karet g. Sepeda motor h. Lainnya								
2.	Fasilitas Kesehatan Lapangan: a. Tenda b. c.								

No.	Sarana	Dinkes	RSU....	RSU....	Pusk....	Pusk....	Pusk....	Pusk....	Dst
3.	Sarana Komunikasi a. Telepon b. Faksimili c. SSB d. HT & Rig e. Handphone biasa f. Handphone satelit								
4.	Buffer stock obat & bahan habis pakai: a. b.								
5.	Alat kesehatan yang digunakan khusus dalam keadaan bencana: a. b. c. d.								
6.	Bahan dan alat sanitasi/kesling: a. PAC b. Kaporit c. d. e.								
7.	Alat Pelindung Diri/APD: a. Masker b. Helm c. Sarung tangan d.								
8.	Kelengkapan Identitas Petugas di lapangan: a. Jaket b. Tanda pengenal c. Rompi d. Seragam Kesehatan e. Topi lapangan f. Lain-lain: g.								

No.	Sarana	Dinkes	RSU....	RSU....	Pusk....	Pusk....	Pusk....	Pusk....	Dst
9.	Fasilitas lainnya, sebutkan: a. b. c. d.								

2. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang dimiliki

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	RSUD		Jml TT :
2	RS Instansi terkait/BUMN		Jml TT :
3.	RSU Swasta		Jml TT :
4.	Puskesmas non Perawatan		
5.	Puskesmas Perawatan		Jml TT :
6.	Pustu		
7.	Polindes		
8.	Lain-lain.....		

Lampiran 2

**FORM PELAPORAN AWAL KEJADIAN BENCANA
(FORM B-1)**

A. JENIS BENCANA

.....

B. DESKRIPSI BENCANA

.....
.....

C. LOKASI BENCANA

1. Dusun :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Letak Geografi :
 - a. Pegunungan
 - b. Pulau/Kepulauan
 - c. Pantai
 - d. Lain-lain (sebutkan) :

D. WAKTU KEJADIAN BENCANA

...../...../200.....
Pukul

E. JUMLAH KORBAN

1. Meninggal : jiwa
2. Hilang : jiwa
3. Luka Berat : jiwa
4. Luka Ringan : jiwa
5. Pengungsi : jiwa KK
6. Lokasi pengungsian :

F. FASILITAS UMUM

1. Akses ke lokasi kejadian bencana :
 - Mudah dijangkau, menggunakan
 - Sukar, karena
2. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan :

3. Keadaan jaringan listrik :
- Baik
 - Terputus
 - Belum tersedia/belum ada

G. SARANA KESEHATAN YANG RUSAK

1. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan

Sarana Kesehatan	Kondisi Bangunan		Fungsi Pelayanan	
	Rusak	Tidak	Ya	Tidak
a. RS				
b. Puskesmas				
c. Pustu				
d. Gudang Farmasi				
e. Polindes				

2. Sumber air bersih yang digunakan
- Cukup
 - Tidak cukup

H. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN

1.
2.
3.
4. dst

I. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN

1.
2.
3.
4. dst

...../...../200.....

Kepala
Puskesmas

(.....)
NIP.

Lampiran 3

**FORM PELAPORAN PENILAIAN KEBUTUHAN CEPAT KESEHATAN
KEJADIAN BENCANA
(FORM B-2)**

A. JENIS BENCANA :

.....

B. DESKRIPSI BENCANA :

.....
.....
.....

C. LOKASI BENCANA

1. Dusun :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Letak Geografi : a. Pegunungan c. Pulau/Kepulauan
b. Pantai d. Lain-lain (sebutkan) :

D. WAKTU KEJADIAN BENCANA :/...../200.....
Pukul

E. JUMLAH PENDUDUK YANG TERANCAM

..... Jiwa KK

F. JUMLAH KORBAN

1. Meninggal : jiwa, Balita : jiwa
2. Hilang : jiwa
3. Luka Berat : jiwa
4. Luka Ringan : jiwa
5. Pengungsi : jiwa KK

Lokasi pengungsian :

Jumlah kelompok rentan pada pengungsi :

- Bayi : jiwa
- Balita : jiwa
- Ibu Hamil : jiwa
- Ibu Menyusui : jiwa
- Lansia : jiwa

6. Jumlah korban yang dirujuk ke :

- Puskesmas
Jumlah : jiwa
- Rumah Sakit
Jumlah : jiwa

G. SARANA KESEHATAN YANG RUSAK

1. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan

Sarana Kesehatan	Kondisi Bangunan		Fungsi Pelayanan	
	Rusak	Tidak	Ya	Tidak
a. RS				
b. Puskesmas				
c. Pustu				
d. Gudang Farmasi				
e. Polindes				

2. Sumber Air Bersih :

- a. Sumur Gali : buah
- b. SPT : buah
- c. PMA : buah
- d. PAH : buah
- e. Perpipaan : buah
- f. Lain-lain (sebutkan) : buah

3. Sarana Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

- a. Jamban Keluarga : buah
- b. MCK : buah
- c. Lain-lain (sebutkan) : buah

H. FASILITAS UMUM

1. Akses ke lokasi kejadian bencana :

- Mudah dijangkau, menggunakan
- Sukar, karena

2. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan :

3. Keadaan jaringan listrik :

- Baik
- Terputus
- Belum tersedia/belum ada

I. KONDISI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LOKASI PENAMPUNGAN PENGUNSI

No.	Jenis Fasilitas	Kondisi	
1.	Jenis tempat penampungan	<input type="checkbox"/> bangunan permanen	<input type="checkbox"/> bangunan darurat
2.	Kapasitas penampungan pengungsi	<input type="checkbox"/> memadai (min. 10 m ³ /or)	<input type="checkbox"/> tidak memadai
3.	Kapasitas penyediaan air bersih	<input type="checkbox"/> memadai (min. 20 L/or/hr)	<input type="checkbox"/> tidak memadai
4.	Sarana MCK	<input type="checkbox"/> memadai (min. 20 or/1 MCK)	<input type="checkbox"/> tidak memadai
5.	Tempat pembuangan sampah	<input type="checkbox"/> memadai (min. 3 m ³ / 60 or)	<input type="checkbox"/> tidak memadai
6.	Sarana SPAL	<input type="checkbox"/> memadai (min. 4 m dari penampungan)	<input type="checkbox"/> tidak memadai
7.	Penerangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

J. KESIAPAN LOGISTIK

1. Obat dan Bahan Habis Pakai : Tidak ada Kurang Cukup
2. Alat Kesehatan : Tidak ada Kurang Cukup
3. Bahan Sanitasi
- a. Kaporit : Tidak ada Kurang Cukup
- b. PAC : Tidak ada Kurang Cukup
- c. Aquatab : Tidak ada Kurang Cukup
- d. Kantong sampah : Tidak ada Kurang Cukup
- e. Repellent lalat : Tidak ada Kurang Cukup
4. Ketersediaan Pangan : Tidak ada Kurang Cukup

K. SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN

1. Transportasi operasional pelayanan kesehatan :
 Tidak ada Kurang Cukup
2. Alat komunikasi : Tidak ada Kurang Cukup
3. Sarana listrik untuk pelayanan kesehatan :
 Tidak ada Kurang Cukup

L. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN

1.
2.
3.
4. dst

M. BANTUAN YANG DIPERLUKAN

1.
2.
3.
4. dst

N. RENCANA TINDAK LANJUT

1.
2.
3.
4. dst

...../...../200.....

Petugas yang melaporkan

NIP.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota

NIP.

Lampiran 4

**FORM PELAPORAN PERKEMBANGAN KEJADIAN BENCANA
(FORM B-3)**

Tanggal/Bulan/Tahun :

Jenis Bencana :

Lokasi Bencana :

Waktu Kejadian Bencana :

A. JUMLAH KORBAN KEADAAN TERAKHIR

1. Meninggal : jiwa, Balita : jiwa
2. Hilang : jiwa
3. Luka Berat : jiwa
4. Luka Ringan : jiwa
5. Pengungsi : jiwa KK
 Lokasi pengungsian :
- Jumlah kelompok rentan pada pengungsi :
 - Bayi : jiwa
 - Balita : jiwa
 - Ibu Hamil : jiwa
 - Ibu Menyusui : jiwa
 - Lansia : jiwa
6. Jumlah korban yang dirujuk ke :
 - Puskesmas
 Jumlah : jiwa
 - Rumah Sakit
 Jumlah : jiwa

B. PERKEMBANGAN KONDISI KESEHATAN KORBAN

1. Jumlah Korban

Fasilitas Kesehatan	Korban Masih Dirawat	Korban Meninggal	Korban Pulang	Korban Dirujuk	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah					

2. Jenis Penyakit Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Posko Kesehatan)

No.	Diagnosa	Umur			Sex		
		0-5 th	≥ 5 th	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

3. Jenis Penyakit Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan
(RS, Puskesmas, Posko Kesehatan)

No.	Diagnosa	Umur			Sex		
		0-5 th	≥ 5 th	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

C. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN

1.
2.
3.
4. dst

D. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN

1.
2.
3.
4. dst

E. RENCANA TINDAK LANJUT

1.
2.
3.
4. dst

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

...../...../200....

Petugas yang melaporkan

NIP.

NIP.

Lampiran 5

**FORM PELAPORAN KEJADIAN BENCANA
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(FORM B-4)**

Tanggal/Bulan/Tahun (**TBT**) :

Jenis bencana (**JB**) :

Lokasi bencana (**LOK**) :

Waktu kejadian bencana (**PKL**) :

Jumlah penduduk terancam (**PAR**) :

Jumlah Korban

a. Meninggal (**MGL**) : Orang

b. Hilang (**HLG**) : Orang

c. Luka berat (**LB**) : Orang

d. Luka ringan (**LR**) : Orang

e. Dirawat

- Puskesmas (**RWP**) : Orang

- Rumah Sakit (**RWS**) : Orang

CARA PENULISAN SMS:

(TBT)....., (JB)....., (LOK)....., (PKL)....., (PAR)....., (MGL).....,
(HLG)....., (LB)....., (LR)....., (RWP)....., (RWS).....

Catatan : Titik titik diisi dengan angka atau huruf sesuai dengan data-data yang ada

Contoh :

(TBT)160507, (JB)Banjir, (LOK)ds antasari, (PKL)10.30wib, (PAR)200, (MGL)25,
(HLG)10, (LB)25, (LR)75, (RWP)10, (RWS)12

Lampiran 6

PETUNJUK PENGISIAN FORM: PELAPORAN AWAL KEJADIAN BENCANA (FORM B-1)

A. JENIS BENCANA:

Jenis bencana diisi dengan bencana yang terjadi seperti:

1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Tanah longsor
4. Gempa bumi
5. Angin Puyuh
6. Gunung Meletus
7. Tsunami
8. Kebakaran hutan
9. Kerusakan
10. Ledakan bom
11. Kegagalan teknologi
12. Terorism
13. Kecelakaan lalu lintas
14. Lain-lain

B. DESKRIPSI BENCANA: gambaran singkat mengenai kejadian bencana dilengkapi dengan skala pengukuran dan luas daerah yang terkena bencana, misalnya banjir terjadi dengan ketinggian kemudian luas daerah yang terkena

C. LOKASI BENCANA: No. 1 s/d 6 sudah jelas

D. WAKTU KEJADIAN BENCANA: sudah jelas

E. JUMLAH KORBAN: sudah jelas

F. FASILITAS UMUM:

1. Akses ke lokasi kejadian bencana adalah transportasi ke lokasi bencana:
 - Bila mudah dijangkau, sebutkan sarana transportasi yang dapat digunakan
 - Bila sukar dijangkau, sebutkan apa masalahnya, contoh: jembatan putus
2. Sebutkan jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan pihak lain
3. Keadaan jaringan listrik: sudah jelas

G. SARANA KESEHATAN YANG RUSAK:

1. Diisi dengan jumlah sarana kesehatan yang mengalami kerusakan akibat bencana dan yang masih berfungsi

2. Sumber air bersih yang digunakan:

Adalah sumber air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

H. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN:

Diisi dengan upaya penanggulangan masalah kesehatan yang sudah dilakukan oleh jajaran kesehatan sampai saat ini, seperti mendirikan pos kesehatan di lokasi bencana, mobilisasi tenaga kesehatan, dll.

I. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN

Diisi dengan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kab/Kota atau Dinas Kesehatan setempat, seperti tenaga, peralatan, obat-obatan, dll.

Keterangan:

Laporan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas atau pejabat yang ditunjuk.

Lampiran 7

**PETUNJUK PENGISIAN
FORM: PELAPORAN PENILAIAN KEBUTUHAN CEPAT KESEHATAN
KEJADIAN BENCANA
(FORM B-2)**

A. JENIS BENCANA:

Jenis bencana diisi dengan bencana yang terjadi seperti:

1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Tanah longsor
4. Gempa bumi
5. Angin Puyuh
6. Gunung Meletus
7. Tsunami
8. Kebakaran hutan
9. Kerusakan
10. Ledakan bom
11. Kegagalan teknologi
12. Terorism
13. Kecelakaan lalu lintas
14. Lain-lain

B. Deskripsi bencana: gambaran singkat mengenai kejadian bencana dilengkapi dengan skala pengukuran dan luas daerah yang terkena bencana, misalnya banjir terjadi dengan ketinggian kemudian luas daerah yang terkena

C. LOKASI BENCANA: No. 1 s/d 6 sudah jelas

D. WAKTU KEJADIAN BENCANA: sudah jelas

E. JUMLAH PENDUDUK YANG TERANCAM:

Adalah semua penduduk yang berada di lokasi bencana

F. JUMLAH KORBAN:

- Pengisian No. 1 s.d. 5 sudah jelas
- Pengisian No. 6 sebutkan nama Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai tempat rujukan (dapat lebih dari satu tempat rujukan)

G. SARANA KESEHATAN YANG RUSAK:

1. Diisi dengan jumlah sarana kesehatan yang mengalami kerusakan akibat bencana dan yang masih berfungsi

2. Sumber air bersih yang digunakan:
Adalah sumber air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
3. Sarana Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Adalah sarana sanitasi dan kesehatan lingkungan yang digunakan di lokasi kejadian bencana

H. FASILITAS UMUM:

1. Akses ke lokasi kejadian bencana adalah transportasi ke lokasi bencana:
 - Bila mudah dijangkau, sebutkan sarana transportasi yang dapat digunakan
 - Bila sukar dijangkau, sebutkan apa masalahnya, contoh: jembatan putus
2. Sebutkan jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan pihak lain
3. Keadaan jaringan listrik: sudah jelas

I. KONDISI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LOKASI PENAMPUNGAN

Diisi sesuai dengan keadaan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi yang meliputi sarana MCK, TPS, air bersih, SPAL, dll.

J. KESIAPAN LOGISTIK

Pilih sesuai dengan keadaan ketersediaan masing-masing logistik yang dimiliki saat itu

K. SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN

Pilih sesuai dengan keadaan ketersediaan masing-masing logistik yang dimiliki saat itu

L. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN

Diisi dengan upaya penanggulangan masalah kesehatan yang sudah dilakukan oleh jajaran kesehatan sampai saat ini, seperti mendirikan pos kesehatan di lokasi bencana, mobilisasi tenaga kesehatan, dll.

M. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN

Diisi dengan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kab/Kota atau Dinas Kesehatan setempat, seperti tenaga, peralatan, obat-obatan, dll.

N. RENCANA TINDAK LANJUT

Diisi dengan rencana yang akan dilakukan dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.

Keterangan:

Laporan ditandatangani oleh Petugas yang bertanggung jawab dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Lampiran 8

PETUNJUK PENGISIAN FORM: PELAPORAN PERKEMBANGAN KEJADIAN BENCANA (FORM B-3)

- Tanggal/bulan/tahun diisi sesuai dengan waktu kejadian bencana
- Jenis bencana:

Diisi dengan bencana yang terjadi seperti:

1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Tanah longsor
4. Gempa bumi
5. Angin Puyuh
6. Gunung Meletus
7. Tsunami
8. Kebakaran hutan
9. Kerusakan
10. Ledakan bom
11. Kegagalan teknologi
12. Terorism
13. Kecelakaan lalu lintas
14. Lain-lain

- Lokasi Bencana
Diisi sesuai dengan tempat kejadian bencana
- Waktu Kejadian Bencana
Diisi dengan pukul berapa kejadian bencana tersebut terjadi

A. JUMLAH KORBAN KEADAAN TERAKHIR

- Pengisian No. 1 s.d. 5 sudah jelas
- Pengisian No. 6 sebutkan nama Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai tempat rujukan (dapat lebih dari satu tempat rujukan)

B. PERKEMBANGAN KONDISI KESEHATAN KORBAN

1. Jumlah korban

Kolom 1. Fasilitas kesehatan diisi dengan nama Puskesmas/Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan korban

Kolom 2,3,4 diisi dengan jumlah korban dengan kondisi yang dirawat, meninggal, pulang atau dirujuk menurut fasilitas kesehatan

Kolom 5 diisi dengan jumlah korban yang dirujuk

Kolom Keterangan diisi dengan keterangan tempat Puskesmas/Rumah Sakit rujukan pasien/korban

2. Jenis Penyakit Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan

Kolom 2. Diisi dengan jenis penyakit yang diderita oleh korban bencana yang mengalami rawat jalan

Kolom 3,4,5,6. Diisi dengan jumlah penderita menurut jenis penyakit yang diderita oleh korban bencana yang mengalami rawat jalan

3. Jenis Penyakit Rawat Inap

Kolom 2. Diisi dengan jenis penyakit yang diderita oleh korban bencana yang mengalami rawat inap

Kolom 3,4,5,6. Diisi dengan jumlah penderita menurut jenis penyakit yang diderita oleh korban bencana yang mengalami rawat inap

C. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN

Diisi dengan upaya penanggulangan masalah kesehatan yang sudah dilakukan oleh jajaran kesehatan sampai saat ini, seperti mendirikan pos kesehatan di lokasi bencana, mobilisasi tenaga kesehatan, dll.

D. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN

Diisi dengan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kab/Kota atau Dinas Kesehatan setempat, seperti tenaga, peralatan, obat-obatan, dll.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Diisi dengan rencana yang akan dilakukan dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.

Keterangan:

Laporan ditandatangani oleh Petugas yang bertanggung jawab dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Lampiran 9

FORM PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) (FORM B-4)

- Tanggal/bulan/tahun diisi sesuai dengan waktu kejadian bencana
- Jenis bencana:

Diisi dengan bencana yang terjadi seperti:

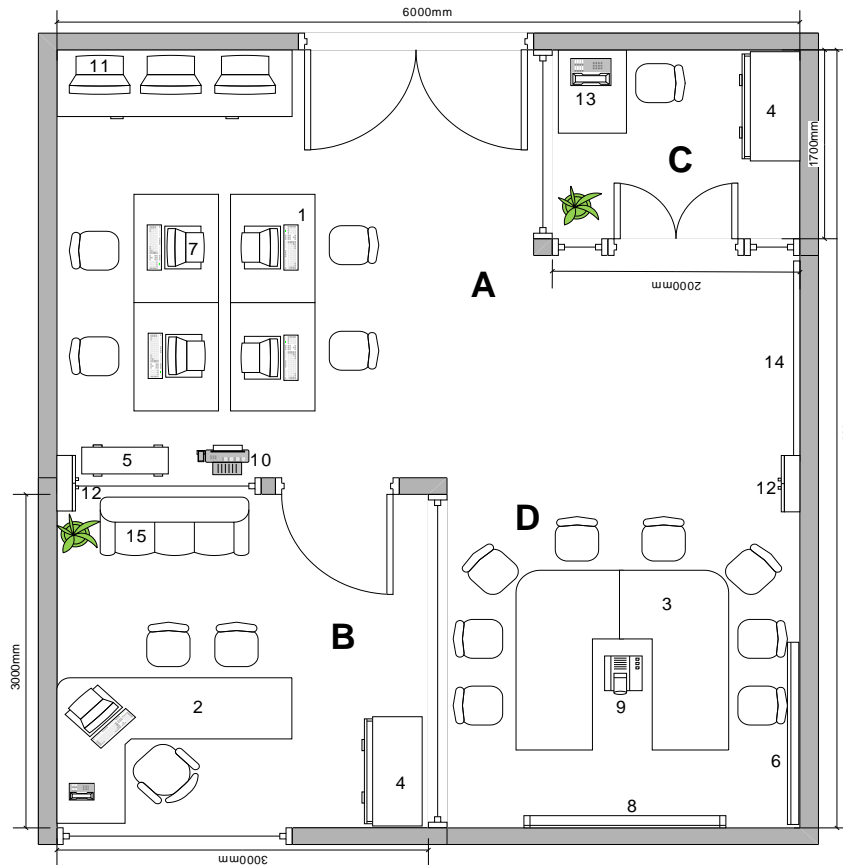
1. Banjir
 2. Banjir Bandang
 3. Tanah longsor
 4. Gempa bumi
 5. Angin Puyuh
 6. Gunung Meletus
 7. Tsunami
 8. Kebakaran hutan
 9. Kerusakan
 10. Ledakan bom
 11. Kegagalan teknologi
 12. Terorism
 13. Kecelakaan lalu lintas
 14. Lain-lain
- Lokasi Bencana
Diisi sesuai dengan tempat kejadian bencana
 - Waktu Kejadian Bencana
Diisi dengan pukul berapa kejadian bencana tersebut terjadi
 - Jumlah Penduduk Terancam
Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di lokasi bencana
 - Jumlah korban: sudah jelas

Keterangan:

Dilengkapi dengan identitas pengirim pesan.

Lampiran 10

**Sketsa Ruang Media Center
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional**



Keterangan Gambar:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A. Ruang Utama | 9. Projector |
| B. Ruang Pimpinan | 10. Telepon dan Fax |
| C. Ruang Radio Komunikasi | 11. Televisi |
| D. Ruang Rapat | 12. AC |
| 1. Meja kerja staf, kursi dan komputer | 13. Alat Radio Komunikasi (RIG / HT) |
| 2. Meja kerja pimpinan model L | 14. Papan Informasi |
| 3. Meja rapat model U | 15. Sofa |
| 4. Lemari File | |
| 5. Server | |
| 6. Marker Board | |
| 7. Komputer | |
| 8. Projection Screen | |

Catatan: Jumlah furniture dan alat-alat kantor dalam gambar tidak mewakili jumlah yang sebenarnya

Lampiran 11

**DAFTAR PERALATAN PEMANTAUAN DAN INFORMASI
DI PPK REGIONAL**

No	Peralatan	Jumlah
1	Komputer	2
2	Monitor	2
3	Notebook	2
4	Printer	4
5	Scanner	1
6	Televisi '21	2
7	LCD Proyektor	1
8	Screen Proyektor	1
9	AC Split	2
10	Pesawat Telepon	1
11	HP satelit	2
12	Mesin Fax	1
13	Handycam	1
14	Camera Digital	1
15	Meja Kerja	3
16	Meja Rapat	1
17	Kursi kerja	9
18	Lemari file	2

**DAFTAR PERALATAN RADIO KOMUNIKASI
DI PPK REGIONAL**

No	Peralatan	Jumlah
1	Handy Talky	30
2	RIG, antena, receiver	1

Lampiran 12

DAFTAR PETA

1. Peta Indonesia
2. Peta Rawan Bencana (Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dll)
3. Peta Lokasi dan Informasi Sarana Kesehatan
4. Peta Lokasi Kejadian Bencana

Lampiran 13**ALAMAT WEBSITE YANG DAPAT DIAKSES**

NO	UNIT KERJA	ALAMAT WEBSITE
1	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	www.bnpb.go.id
2	Departemen Kesehatan	www.depkes.go.id
3	Pusat Penanggulangan Krisis, Departemen Kesehatan	www.ppk-depkes.org
4	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	www.bmg.go.id
5	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	www.vsi.esdm.go.id
6	Detikcom Digital Life	www.detik.com
7	Kompas Cyber Media	www.kompas.com
8	Metro TV Online	www.metrotvnews.com
9	Liputan 6 SCTV	www.liputan6.com
10	RCTI	www.rcti.tv/news/index.php
11	Tempo	www.tempointeraktif.com
12	Seputar Indonesia	www.seputar-indonesia.com
13	WHO	www.who.or.id
14	Bappenas	www.bappenas.go.id
15	Bakornas	www.bakornaspbp.go.id
16	Aceh Media Center	www.acehmediacenter.or.id
17	Bakosurtanal	www.bakosurtanal.go.id
18	Jakarta Post	www.thejakartapost.com
19	Republika	www.republika.co.id
20	UNDP	www.undp.or.id

Lampiran 14

DAFTAR JADUAL PEMANTAUAN ACARA TELEVISI

Waktu	TV 1	TV 2	TV 3
04.30		METRO TV	TV ONE (Kabar Pagi)
04.45	Trans TV (Reportasi pagi)	METRO TV	
05.00	SCTV (Liputan 6 pagi)	METRO TV	RCTI (Nuansa Pagi)
06.30	TV ONE (Apa Kabar Indonesia)	METRO TV	
06.45		METRO TV	Trans 7 (Redaksi Pagi)
10.00	TVRI (Berita Nusantara)	METRO TV	
11.30	TV ONE (Kabar Siang)	METRO TV	ANTV (Topik Siang)
12.00	Indosiar (Fokus Siang)	METRO TV	TVRI (Berita siang)
13.00	Global TV (Global Siang)	METRO TV	
16.30	Trans TV (Jelang Sore)	METRO TV	Trans 7 (Redaksi Sore)
17.00	TransTV (Reportase Sore)	METRO TV	
17.30		METRO TV	ANTV (Topik Petang)
18.00	TV ONE (Kabar Petang)	METRO TV	
19.00	TVRI (Berita Nasiona)	METRO TV	
19.30	Global TV (Berita Global)	METRO TV	
21.00	TVRI (Dunia dalam Berita)	METRO TV	
23.30		METRO TV	ANTV (Topik Malam)
00.00		METRO TV	TV ONE (Kabar Malam)
00.30	Trans 7 (Redaksi Malam)	METRO TV	
01.00	Trans TV (Reportase Malam)	METRO TV	

“ Ten Code (Kode Sepuluh) RAPI “

51 - 55	Salam sejahtera untuk keluarga	10 - 42	Ada kecelakaan di
10 - 1	Sulit didengar / Penerimaan Buruk	10 - 43	Kemacetan lalu lintas di
10 - 2	Terdengar jelas / Penerimaan Baik	10 - 44	Ada pesan untuk anda
10 - 3	Berhenti mengudara/Memancar (cherio)	10 - 45	Dalam jangkauan mohon melapor
10 - 4	Berita diterima dgn Baik [dimengerti]	10 - 46	Memerlukan Montir
10 - 5	Ada pesan untuk disampaikan	10 - 50	Mohon kosongkan jalur [channel]
10 - 6	Sedang sibuk, kecuali ada berita penting	10 - 60	Apakah ada pesan selanjutnya
10 - 7	Mengalami kerusakan/Tidak mengudara	10 - 62	Tidak dimengerti / melalui telepon saja
10 - 8	Tidak ada kerusakan / Dapat mengudara	10 - 63	Tugas [pekerjaan] selanjutnya di
10 - 9	Mohon diulang [repeat]	10 - 64	Pekerjaan telah selesai
10 - 10	Penyampaian berita selesai	10 - 65	Menunggu berita selanjutnya
10 - 11	Berbicara terlalu cepat	10 - 67	Semua unit setuju
10 - 12	Mengundurkan diri karena ada tamu	10 - 69	Pesanan telah diterima
10 - 13	Laporan keadaan cuaca dan jalanan	10 - 70	Kebakaran di
10 - 14	I n f o r m a s i	10 - 71	Perangkat [Pesawat] yg digunakan
10 - 15	Informasi sudah disampaikan	10 - 73	Kurangi kecepatan di
10 - 16	Mohon dijemput [diambil] di	10 - 74	Tidak [negative]
10 - 17	Ada urusan Penting	10 - 75	Menyebabkan [Penyebab] gangguan
10 - 18	Sesuatu untuk kita	10 - 76	Dalam perjalanan menuju ke
10 - 19	Bukan untuk anda, Harap kembali	10 - 77	Belum [Tidak] Kontak
10 - 20	Lokasi / Posisi	10 - 80	Repeater [Pancar Ulang]
10 - 21	Hubungan [kontak] melalui Telepon	10 - 81	Pesankan kamar di hotel
10 - 22	Melapor langsung ke	10 - 82	Pesanan kamar untuk
10 - 23	Menunggu [STAND BY]	10 - 84	Nomor Telepon
10 - 24	Selesai melaksanakan tugas	10 - 85	A l a m a t [rumah]
10 - 25	Dapat menghubungi / kontak dengan	10 - 89	Butuh montir radio
10 - 26	Pesanan terakhir kurang diperhatikan	10 - 90	Gangguan pesawat TV
10 - 27	Pindah jalur [channel]	10 - 91	Berbicara dekat microfon
10 - 28	Nama Panggilan [call sign]	10 - 92	Pemancar perlu distel
10 - 29	Waktu kontak (hubungan) habis	10 - 93	Apakah frekwensi sudah tepat
10 - 30	Tidak mentaati peraturan	10 - 94	Berbicara agak panjang
10 - 31	Antenna yang digunakan	10 - 95	Mengudara dgn signal setiap 5 detik
10 - 32	Radio check / Laporn signal & modulasi	10 - 97	Test jarum di pesawat [check]
10 - 33	Keadaan darurat [emergency]	10 - 99	Tugas selesai, Semua Selamat
10 - 34	Btuh bantuan/ada kesulitan di stasiun ini	10 - 100	Akan ke kamar mandi
10 - 35	Informasi rahasia	10 - 200	Perlu bantuan Polisi di
10 - 36	Jam berapa waktu yang tepat	10 - 300	Perlu bantuan Pemadam Kebakaran di ...
10 - 37	Perlu mobil derek di	10 - 400	Perlu bantuan Penertiban Umum di
10 - 38	Perlu Ambulance di	10 - 500	Perlu bantuan Provost di
10 - 39	Pesan sudah disampaikan	10 - 600	Perlu bantuan Garnizun di
10 - 40	Perlu dokter	10 - 700	Perlu bantuan SAR di
10 - 41	Mohon pindah ke jalur [channel]	10 - 800	Perlu bantuan PLN di

File : Dr. Jones S. [JZ 02 CAS]